

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berawal pada masa Presiden Bush, Amerika Serikat memperkuat kebijakan pertahanan Jepang karena adanya ancaman senjata nuklir Korea Utara dan perkembangan pesat militer Tiongkok. Presiden Bush meminta Jepang untuk segera mengubah kebijakannya demi memperkuat kekuatan aliansi militer Amerika Serikat – Jepang. Dengan adanya perubahan kebijakan pertahanan Jepang, Amerika Serikat mengharapkan semakin mudah dan banyak kerjasama militer yang mungkin dilakukan Amerika Serikat – Jepang di masa mendatang dalam rangka menangkal ancaman kekuatan Korea Utara dan Tiongkok.

Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Presiden Obama menempatkan kawasan Asia Pasifik menjadi prioritas utama pada Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat. Kebijakan ini dikenal dengan nama “*The Pivot to Asia*” Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menjadi negara hegemon di kawasan Asia Pasifik tanpa kekuatan pesaing. Bagi Amerika Serikat setidaknya memiliki empat tujuan utama yang mendasari keterlibatan di daerah Asia Timur, antara lain *pertama*, mencegah munculnya hegemoni regional yaitu kekuatan militer Tiongkok dan Korea Utara; *kedua*, mempertahankan jalur transit di daerah Asia Timur baik jalur laut maupun udara; *ketiga*, menjaga akses komersial yang dibutuhkan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan perdagangan; *keempat*, memperkuat dan mempertahankan keamanan di antara sekutu dalam rangka membendung kekuatan militer Korea Utara dan Tiongkok di kawasan Asia Timur.

Kekuatan militer Tiongkok dan Korea Utara yang mengalami perkembangan pesat dianggap Amerika Serikat dapat menghalangi kepentingannya di kawasan ini. Kekuatan Tiongkok dan Korea Utara berada pada sub-kawasan Asia Timur, yang mana pada kawasan ini Amerika Serikat memiliki hubungan aliansi dengan Jepang. Untuk itulah Amerika Serikat menganggap

persekutuan bersama Jepang adalah strategi untuk membendung kekuatan militer Tiongkok dan Korea Utara di kawasan Asia Timur.

Perkembangan pesat militer Tiongkok dan kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara mengakibatkan Amerika Serikat meminta Jepang untuk lebih memperhatikan masalah pertahanannya. Perubahan kebijakan pertahanan Jepang dianggap Amerika Serikat sebagai langkah yang penting dalam kepentingan untuk menangkal kekuatan militer Tiongkok dan Korea Utara. Jepang melakukan perubahan kebijakan pertahanannya ketika badan pertahanan Jepang di tingkatkan statusnya menjadi Kementerian Pertahanan yang dipimpin langsung oleh seorang menteri dan berhak secara langsung mengajukan anggaran pertahanan sendiri.

Berdirinya kementerian pertahanan Jepang menjadi momentum penting bagi Jepang untuk terus bertransformasi dalam kekuatan militernya. Kementerian Pertahanan berdiri diikuti dengan kenaikan anggaran belanja pada 2006, perkembangan teknologi militer dan perubahan doktrin penggunaan kekuatan militer. Semua perubahan ini atas dorongan Amerika Serikat kepada Jepang dalam merespon ancaman yang terlihat dari perkembangan militer Tiongkok dan kepemilikan senjata nuklir Korea Utara.

Penambahan fasilitas militer serta semakin banyak di tandatangani nota kesepakatan bersama Amerika Serikat – Jepang merupakan bukti bahwa kekuatan aliansi militer Amerika Serikat – Jepang semakin kuat pasca Kementerian Pertahanan Jepang berdiri. Tujuan transformasi militer Jepang ini agar Jepang tidak lagi mengikuti pasal 9 Konstitusi 1947 yang berisi tentang ketergantungan Jepang terhadap payung militer Amerika Serikat, tetapi menjadi sekutu aliansi yang mandiri demi menghadapi ancaman kekuatan Tiongkok dan Korea Utara.

Jadi kepentingan Amerika Serikat dalam memperkuat perubahan kebijakan pertahanan Jepang adalah untuk *Balance of Threat* yaitu berusaha menyeimbangi kekuatan militer Korea Utara dan Tiongkok, dengan strategi *Extended Deterrence* yang ditujukan pada Tiongkok dan Korea Utara. Tiongkok dan Korea Utara dianggap menghalangi Amerika Serikat dalam mencapai kepentingan nasionalnya

di kawasan ini, termasuk kepentingan investasi ekonominya pada jalur perdagangan Asia Pasifik.

## 5.2 SARAN

Amerika Serikat memiliki kepentingan dari perubahan kebijakan pertahanan Jepang. Kepentingan tersebut terkait dengan keinginan Amerika Serikat menjaga kawasan Asia Timur dari kekuatan militer Korea Utara dan Tiongkok. *Security Dilema* yang disebabkan Tiongkok dan Korea Utara mengancam kepentingan Amerika Serikat di kawasan ini. Beberapa kepentingan Amerika Serikat dalam keterlibatan di Asia Timur antara lain, berusaha mencegah negara-negara yang berada pada kawasan ini menjadi hegemon; kepentingan jalur akses transit Amerika Serikat pada negara mitra di kawasan ini; kepentingan menjaga jalur perdagangan demi investasi masa depan; dan yang terakhir yaitu hubungan aliansi dengan mitra Amerika Serikat di kawasan semakin kuat untuk membendung kekuatan militer Korea Utara dan Tiongkok.

Dengan adanya kebijakan Presiden Obama "*The Pivot to Asia*" diharapkan dapat membendung kekuatan yang muncul di wilayah Asia khususnya Asia Timur yang mulai menunjukkan kekuatannya lewat negara Korea Utara dan Tiongkok, guna terus mendukung kepentingan – kepentingan yang dimiliki Amerika Serikat di wilayah tersebut.

Dengan berdirinya/terbentuknya kementerian pertahanan Jepang, diharapkan dapat membendung ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan militer Tiongkok dan Korea Utara yang mengalami perkembangan pesat. Untuk itu, Amerika Serikat harus mendukung militer Jepang untuk mengamankan kepentingan Amerika Serikat. Dalam perkembangan di era globalisasi, setiap negara mulai menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, untuk itu diperlukan kerjasama dengan negara lain untuk menjaga stabilitas negaranya dan dunia.

Ketika perang dingin berakhir pada awal 1990an, perjanjian keamanan Jepang-Amerika Serikat mulai melemah, hal ini memunculkan gagasan untuk mencari bentuk baru dari perjanjian Jepang-Amerika Serikat. Pada 17 April 1996 akhirnya Jepang dan Amerika Serikat memperbarui perjanjian keamanannya

dengan menandatangani *Japan-US Joint Declaration on Security-Alliance for the Twenty-First Century*. Adanya *Joint Statement* pada tahun 1997, menciptakan landasan yang solid untuk kerjasama Jepang-Amerika Serikat baik dalam bidang keadaan keamanan Asia Timur yang normal maupun tidak menentu.

Jepang mengalami peningkatan jumlah pasukan militer semenjak kekuatan pertahanannya dibangun pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II. Sedikit berbeda dengan pasukan militer di negara lain, dibentuknya pasukan bernama *Japan Self Defense Force* atau JSDF pada tahun 1954 sebatas hanya pasukan bela diri bukan sepenuhnya militer.

Doktrin penggunaan kekuatan militer adalah tujuan dari suatu negara menggunakan kekuatannya dan bagaimana cara suatu negara dalam memakai kekuatannya. Jepang telah beberapa kali mengganti *white paper* pertahanannya, dimulai pada tahun 1976 yaitu *National Defense Program Guidelines*-nya (NDPG) yang pertama, yang diikuti dengan NDPG berikutnya, tahun 1995, 2004 dan yang terakhir tahun 2010.

Teknologi Militer merupakan salah satu indikator yang sering untuk melihat kapabilitas militer suatu negara. Teknologi militer Jepang mulai berkembang pasca dikeluarkannya NDPG 1976. Dalam *white paper* tersebut mengarahkan Jepang untuk melakukan transformasi pada alusista misalnya dengan pengadaan peralatan militer dan pengembangan dengan meningkatkan (*upgrade*) senjata militer tersebut